

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR MAKROEKONOMI YANG
MEMPENGARUHI INVESTASI SEKTOR TRANSPORTASI DI
INDONESIA PERIODE 2001-2010**



Oleh:

IRENE LILIAN PETRUS

A 111 08 252

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2012

KATA PENGANTAR

Sembah dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan lindungan-Nya dalam menjalani masa perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Analisis Faktor-Faktor Makroekonomi Yang Mempengaruhi Investasi Sektor Transportasi Di Indonesia Periode 2001-2010”.

Segala upaya dan kemampuan yang maksimal telah penulis berikan dalam penulisan skripsi ini guna sebagai penambahan, pengembangan wawasan dan studi. Namun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan penulisan ilmiah ini.

Selama menempuh perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis sudah sangat banyak memperoleh motivasi, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan diiringi rasa hormat yang mendalam, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya, yaitu Ayanda Petrus Kopong dan ibunda Theresia Maria, kakak saya Patrick Wulaa Petrus, Herda Kumala Dewi, serta kedua adik saya Dewi Arini dan Tony Male yang selalu memberikan motivasi, dukungan moril serta materiil kepada saya.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin

3. Ibu Prof. Rahmatiah, SE., MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, ibu Retno Fitrianti, SE., M.Si dan bapak Rahman Farisi, SE., MSE selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Rahman Razak, MS dan bapak Hamrullah, SE., M.Si selaku pembimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan saya angkatan 2008 di Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, yaitu Dian, Stania, Leliana, Ika, Fira, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Sahabat-sahabat saya yang berada ditempat lain, yaitu Darti, Mirah, Zero, dan Nuning, terima kasih buat semangat yang telah kalian berikan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Suku Bunga terhadap Investasi sektor transportasi di Indonesia periode 2001-2010. Analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan bantuan program komputer *views 3.1*. Untuk tujuan penelitian digunakan data sekunder berupa *time series* tahun 2001-2010, yaitu data belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat suku bunga dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor transportasi. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal, buku, dan hasil penelitian lainnya .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga mempengaruhi besarnya penanaman modal dalam negeri sektor transportasi. Belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor transportasi di Indonesia. Sedangkan inflasi dan tingkat suku bunga, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang negatif terhadap penanaman modal dalam negeri sektor transportasi di Indonesia.

Kata kunci : *Investasi, Belanja Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Suku Bunga*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the Government Expenditure, Economic Growth, Inflation, Interest Rate of Investment in the transportation sector of Indonesia 2001-2010 period. The analysis used was multiple linier analysis with the help of a computer program evIEWS 3.1. For the purpose of the study used secondary data from time series in 2001-2010, the data of the government expenditure, economic growth, total employment, inflation and interest rate and domestic investment transport sector. Data obtained from the Central Statistics Agency, journals, books, and other research.

The results showed government expenditure, economic growth, inflation and interest rate affects the amount of domestic investment in the transport sector. Government expenditure and economic growth positive affect domestic investment transport sector in Indonesia. While the inflation and interest rates, the two variables have a negative influence on domestic investment in the transport sector in Indonesia.

Key words: investment, government expenditure, economic growth, Inflation, Interest Rate

DAFTAR ISI	Hal
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teoritis	8
2.1.1 Investasi	8
2.1.2 Transportasi	9
2.1.2.1 Peranan Transportasi	10
2.1.2.2 Fungsi Transportasi	12
2.1.2.3 Manfaat Transportasi	13
2.1.2.4 Jenis Alat atau Moda Transportasi	14
2.1.3 Belanja Pemerintah	16
2.1.3.1 Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Investasi	18

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	19
2.1.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Investasi	20
2.1.5 Inflasi	22
2.1.5.1 Jenis Inflasi	23
2.1.5.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Investasi	24
2.1.6 Tingkat Suku Bunga	24
2.1.6.1 Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Investasi	25
2.2 Kajian Empiris Hasil-Hasil Penelitian Sebelumnya	26
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian	29
2.4 Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.2 Metode dan Teknik Pengumpulan Data	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.4 Metode Analisis Data	32
3.7 Definisi Operasional	33
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Negara Indonesia	34
4.1.1 Posisi Geografis Indonesia	34
4.1.2 Demografi Indonesia	35
4.2 Kondisi Makroekonomi Indonesia	37
4.3 Perkembangan Transportasi di Indonesia	39
4.3.1 Transportasi Darat	39
4.3.2 Transportasi Laut	42

4.3.3 Transportasi Udara	44
4.4 Perkembangan Belanja Pemerintah di Indonesia	45
4.5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	47
4.6 Perkembangan Inflasi di Indonesia	48
4.7 Perkembangan Tingkat Suku Bunga di Indonesia	49
4.8 Perkembangan Investasi Sektor Transportasi di Indonesia	50
4.9 Hasil Analisis Data	51
4.9.1 Interpretasi Model	52
4.9.2 Pembahasan	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 30

DAFTAR GRAFIK	Hal
Grafik 4.1 Perkembangan Tingkat Inflasi di Indonesia (2001-2010)	49
Grafik 4.2 Perkembangan Suku Bunga Kredit di Indonesia (2001-2010)	50
Grafik 4.3 Perkembangan PMDN Sektor Transportasi di Indonesia	51

DAFTAR TABEL	Hal
Tabel 1.1 Investasi Sektor Transportasi	3
Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	4
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Indonesia (ribu) 1980-2010	36
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi (1996-2010) ...	37
Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor (2001-2009)	39
Tabel 4.4 Jumlah Penumpang dan Barang Melalui Transportasi Kereta Api (2001- 2009)	41
Tabel 4.5 Bongkar Muat Barang Antarpulau dan Luar Negeri di Pelabuhan Indonesia (2001-2009) (000Tons)	43
Tabel 4.6 Jumlah Penumpang Kapal di Pelabuhan Yang Diusahakan dan Tidak Diusahakan (2001-2009)	43
Tabel 4.7 Jumlah Keberangkatan Penumpang dan Barang di Bandara Indonesia (2001-2009)	44
Tabel 4.8 Belanja Pemerintah Tahun 2001-2008	46
Tabel 4.9 Belanja Pembangunan Tahun 2001-200	47
Tabel 5.0 Hasil Analisis Model Regresi	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketersediaan jasa transportasi berkorelasi positif dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat. Jasa transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal, berarti kegiatan produksi dilaksanakan secara efektif dan efisien, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, selanjutnya kesenjangan antardaerah dapat ditekan menjadi sekecil mungkin.

Pengangkutan menyanggah peranan sebagai penunjang dan pemacu bila angkutan dipandang dari sisi melayani dan meningkatkan pembangunan. Selain itu, transportasi terkait pula dengan produktivitas. Kemajuan transportasi akan membawa peningkatan mobilitas manusia, mobilitas faktor-faktor produksi, dan mobilitas hasil olahan yang dipasarkan. Makin tinggi mobilitas berarti lebih cepat dalam gerakan dan peralatan yang terefleksi dalam kelancaran distribusi serta lebih singkat waktu yang diperlukan untuk mengolah bahan dan memindahkannya dari tempat dimana barang tersebut kurang bermanfaat ke lokasi dimana manfaatnya lebih besar. Makin tinggi mobilitas dengan demikian berarti lebih produktif.

Transportasi menciptakan guna tempat dan guna waktu, karena nilai barang menjadi lebih tinggi di tempat tujuan dibandingkan di tempat asal, selain dari itu barang tersebut diangkut cepat sehingga sampai di tujuan tepat waktu untuk

memenuhi kebutuhan. Transportasi merupakan kegiatan jasa pelayanan, jasa transportasi diperlukan untuk membantu kegiatan sektor-sektor lain (sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor konstruksi, sektor keuangan, sektor pemerintahan, transmigrasi, pertahanan-keamanan dan lainnya) untuk mengangkut barang dan manusia dalam kegiatan pada masing-masing sektor tersebut. Oleh karena itu, jasa transportasi itu dikatakan *derived demand* atau permintaan yang diderivasi atau turunan, artinya permintaan jasa transportasi bertambah karena diperlukan untuk melayani berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan yang meningkat. Bertambahnya permintaan jasa transportasi disebabkan oleh karena bertambahnya kegiatan sektor-sektor lain.

Dalam perkembangannya, sektor transportasi di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin pesat yang dapat dilihat dari banyaknya kendaraan bermotor yang ada. Hal ini dibarengi oleh jumlah investasi yang diperuntukkan membiayai pembangunan sarana dan prasarana transportasi tersebut. Investasi merupakan kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah diolah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata. Namun dalam memanfaatkan sumberdaya alam perlu memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan. Peranan investasi di Indonesia cenderung meningkat sejalan dengan banyaknya dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan nasional. Investasi merupakan suatu faktor yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi, atau

pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor ekonomi.

Perkembangan investasi pada sektor transportasi di Indonesia mengalami fluktuasi jumlah. Pada tahun 2001, investasi dalam negeri sektor transportasi senilai Rp 1510.1 miliar dan mengalami kenaikan pada tahun berikutnya menjadi Rp 3125.7 miliar.

Tabel 1.1 Investasi Sektor Transportasi di Indonesia Periode 2001-2010

Tahun	PMDN Transportasi (Milyar Rupiah)
2001	1510.1
2002	3125.7
2003	2022
2004	1885.1
2005	2375.1
2006	1930.3
2007	286.2
2008	429,2
2009	809,2
2010	13787,7

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Terjadinya fluktuasi pada jumlah investasi dalam negeri sektor transportasi ini juga diikuti dengan keadaan makroekonomi di Indonesia yang juga berfluktuasi dari tahun ke tahunnya. Dalam konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana yang menonjol adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat dijadikan salah satu ukuran dari pembangunan atau pencapaian perekonomian negara tersebut. Wijono (2005) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu Negara (Isa Salim, 2006).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sama halnya dengan keadaan investasi, juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 sebesar 3,64% dan mengalami kenaikan pada tahun berikutnya menjadi 4,50%. Hal ini juga berbarengan dengan keadaan investasi sektor transportasi.

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Selama 2001-2010

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2001	3,64
2002	4,50
2003	4,78
2004	5,03
2005	5,69
2006	5,50
2007	6,35
2008	6,01
2009	4,58
2010	6,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Dalam upaya pembangunan dan perbaikan dalam sektor transportasi diperlukan campur tangan pemerintah, baik penyediaan jasa angkutan sampai subsidi untuk sektor transportasi. Hal ini dikarenakan adanya hal-hal yang tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta, seperti sifat dan ketentuan pengaturannya maupun karena keperluan akan dana yang besar. Namun tidak berarti peranan pihak swasta dapat diabaikan.

Peran pemerintah dalam sektor transportasi tentu berpengaruh pada perkembangan sektor transportasi itu sendiri. Namun seberapa besar pengaruh peranan tersebut, dapat dilihat dari belanja yang dilakukan pemerintah untuk sektor

ini, dimana pemerintah menitiktargetkan pembangunan yang terealisasi sesuai dengan besar belanja yang dilakukannya.

Belanja negara juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanjanya. Berdasarkan jenis belanja tersebut, perkembangan belanja pemerintah pusat masih didominasi oleh pengeluaran yang sifatnya wajib (*non discretionary expenditure*) daripada pengeluaran yang bersifat tidak mengikat. Pengeluaran yang sifatnya wajib meliputi: belanja pegawai, pembayaran bunga utang, subsidi, dan sebagian belanja barang. Pengeluaran yang tidak mengikat seperti: belanja modal, bantuan sosial, sebagian belanja barang dan belanja lain-lain.

Investasi suatu negara juga sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi, juga pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat suku bunga dan keadaan ekonomi secara makro yang akan mengakibatkan perubahan pada jumlah investasi yang akan dilakukan oleh penanam modal. Tingkat inflasi yang sangat mengkhawatirkan akan memberikan dampak kepada penanaman modal dalam negeri dimana dengan terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang-barang yang secara terus menerus akan mengakibatkan terjadinya perubahan kemampuan masyarakat dalam membeli barang-barang produksi yang kemungkinan menjadi menurun dan mengurangi gairah produsen dalam menciptakan atau memproduksi barang dan jasa.

Semakin tinggi perubahan tingkat harga maka akan semakin tinggi pula *opportunity cost* untuk memegang aset finansial. Artinya masyarakat akan merasa lebih beruntung jika memegang aset dalam bentuk riil dibandingkan dengan aset finansial jika tingkat harga tetap tinggi. Jika aset finansial luar negeri dimasukan

sebagai salah satu pilihan aset, maka perbedaan tingkat inflasi dapat menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan melemah yang pada gilirannya akan menghilangkan daya saing komoditas Indonesia (Susanti, 2000). Hal ini bila dilihat oleh para investor, maka akan mengurangi minat investor dalam menanamkan modalnya dan lebih memilih untuk menyimpan dananya di bank karena dampak inflasi juga akan mengakibatkan nilai suku bunga simpanan menjadi meningkat guna mengurangi jumlah uang beredar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai sejauh mana variabel-variabel tersebut mempengaruhi investasi sektor transportasi, maka penulis memilih judul : **“Analisis Faktor-Faktor Makroekonomi Yang Mempengaruhi Investasi Sektor Transportasi Di Indonesia Periode 2001-2010”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah ”Berapa besar pengaruh Belanja Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga terhadap investasi sektor transportasi di Indonesia selama tahun 2001-2010?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh Belanja Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga terhadap investasi sektor transportasi di Indonesia selama tahun 2001-2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Ilmiah, untuk memahami dan mendalami masalah-masalah di bidang Ilmu Ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan Investasi di Sektor Transportasi.
2. Manfaat Praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah serupa.
3. Manfaat Kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam pengambilan kebijakan, khususnya yang dapat mengoptimalkan investasi di sektor transportasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman-penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dimasa yang akan datang, (Sadono, 2006).

Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah:

1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh.
2. Suku bunga.
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa yang akan datang.
4. Kemajuan teknologi.
5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.

Ada tiga tipe pengeluaran investasi. Pertama, investasi dalam barang tetap (*business fixed investment*) yang melingkupi peralatan dan struktur dimana dunia usaha membelinya untuk dipergunakan dalam produksi. Kedua, investasi perumahan (*residential investment*) melingkupi perumahan baru dimana orang membelinya untuk

ditempati atau pemilik modal membeli untuk disewakan. Ketiga, investasi inventori (*inventory investment*) meliputi bahan baku dan bahan penolong, barang setengah jadi dan barang jadi (Tedy Herlambang, 2001).

Peranan investasi terhadap kapasitas produksi nasional memang sangat besar, karena investasi merupakan penggerak perekonomian, baik untuk penambahan faktor produksi maupun berupa peningkatan kualitas faktor produksi, investasi ini nantinya akan memperbesar pengeluaran masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat dengan bekerja *multiplier effect*. Faktor produksi akan mengalami penyusutan, sehingga akan mengurangi produktivitas dari faktor-faktor produksi tersebut. Supaya tidak terjadi penurunan produktivitas (kapasitas) nasional harus diimbangi dengan investasi baru yang lebih besar dari penyusutan faktor-faktor produksi. Akhirnya perekonomian masyarakat (nasional) akan berkembang secara dinamis dengan naiknya investasi yang lebih besar dari penyusutan faktor produksi tersebut. Bila penambahan investasi lebih kecil dari penyusutan faktor-faktor produksi, maka terjadi stagnasi perekonomian untuk dapat berkembang (Nasution,1996).

2.1.2 Transportasi

Transportasi dapat diartikan sebagai kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal (*origin*) ke tempat tujuan (*destination*), (Rahardjo Adisasmita 2010).

Unsur – unsur transportasi meliputi :

1. Manusia yang membutuhkan

2. Barang yang dibutuhkan
3. Kendaraan sebagai alat/sarana
4. Jalan dan terminal sebagai prasarana transportasi
5. Organisasi (pengelola transportasi)

Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat dan budaya suatu bangsa dan daerah, kebutuhan akan angkutan tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (*personal place utility*).

2.1.2.1 Peranan Transportasi

Peranan pengangkutan mencakup bidang yang luas di dalam kehidupan meliputi atas berbagai aspek (Nasution, 2003) yakni:

a) Aspek Sosial dan Budaya

Dampak sosial yang dapat dirasakan dengan adanya transportasi adalah adanya peningkatan standar hidup. Transportasi menekankan biaya dan memperbesar kuantitas keanekaragaman barang, hingga terbuka kemungkinan adanya perbaikan dalam perumahan, sandang, pangan dan rekreasi, serta adanya peningkatan pemahaman dan intelegensi masyarakat. Sedangkan untuk budaya, dampak yang dapat dirasakan adalah terbukanya kemungkinan keseragaman gaya hidup, kebiasaan dan bahasa (Nasution.2003).

b) Aspek Politis dan Pertahanan

Bagi aspek politis dan pertahanan, transportasi dapat memberikan dua keuntungan yaitu :

- Transportasi dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Dengan adanya sistem dan sarana perhubungan yang baik maka akan dapat memperkokoh stabilitas politik negara kesatuan.
- Transportasi merupakan alat mobilitas unsur pertahanan dan keamanan dimana transportasi dapat digunakan untuk tujuan strategis pertahanan karena adanya wahana transportasi yang efektif dalam karya bakti dalam proyek – proyek pembangunan nyata.

c) Aspek Hukum

Didalam pengoperasian dan pemilikan alat angkutan diperlukan ketentuan hukum mengenai hak dan tanggung jawab serta perasuransian apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, juga terhadap penerbangan luar negeri yang melewati batas wilayah suatu negara, diatur dalam perjanjian antar negara (*bilateral air agreement*).

d) Aspek Teknis

Hal - hal yang berkaitan dengan pembangunan dan pengoperasian transportasi menyangkut aspek teknis yang harus menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pengangkutan.

e) Aspek Ekonomi

Peranan pengangkutan tidak hanya untuk memperlancar arus barang dan mobilitas manusia. Pengangkutan juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Dari aspek ekonomi, pengangkutan

dapat ditinjau dari sudut ekonomi mikro dan makro. Dari sudut ekonomi makro pengangkutan merupakan salah satu prasarana yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang dapat dilihat dari kepentingan dua pihak yaitu :

1) Pada pihak perusahaan pengangkutan (*operator*)

Pengangkutan merupakan usaha memproduksi jasa angkutan yang dijual kepada pemakai dengan memperoleh keuntungan.

2) Pada pihak pemakai jasa angkutan (*user*).

Pengangkutan sebagai salah satu mata rantai dari arus bahan baku untuk produksi dan arus distribusi barang jadi disalurkan ke pasar serta kebutuhan pertukaran barang di pasar. Supaya kedua arus ini lancar, jasa angkutan harus cukup tersedia dan sebanding dengan seluruh biaya produksi.

2.1.2.2 Fungsi Transportasi

Transportasi perlu untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tempat tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi, dalam wujud sarana (kendaraan) dan prasarana (jalan). Dari sini timbul jasa angkutan untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain.

Transportasi memiliki fungsi, yaitu :

- a. Melancarkan arus barang dan manusia
- b. Menunjang perkembangan dan pembangunan (*the promoting sector*)
- c. Penunjang dan perangsang pemberian jasa bagi perkembangan perekonomian (*the service sector*).

2.1.2.3 Manfaat Transportasi

a. Manfaat Ekonomi

Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi.

b. Manfaat Sosial

Transportasi menyediakan berbagai kemudahan, diantaranya :

- a. Pelayan untuk perorangan atau kelompok
- b. Pertukaran atau penyampaian informasi
- c. Perjalanan untuk bersantai
- d. Memendekkan jarak
- e. Memencarkan penduduk.

c. Manfaat Politis

1. Pengangkutan menciptakan persatuan dan kesatuan nasional yang semakin kuat dan meniadakan isolasi.
2. Pengangkutan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat dapat dikembangkan atau diperluas dengan lebih merata pada setiap bagian wilayah suatu negara.
3. Keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri yang tidak dikehendaki kamungkinan sekali tergantung pada pengangkutan yang efisien yang memudahkan mobilisasi segala daya (kemampuan dan

ketahanan) nasional, serta memungkinkan perpindahan pasukan – pasukan selama perang.

4. Sistem pengangkutan yang efisien memungkinkan negara memindahkan dan mengangkut penduduk dari daerah yang mengalami bencana ke tempat yang lebih aman.

d. Manfaat Kewilayahan

Selain dapat memenuhi kebutuhan penduduk di kota, atau pedalaman, keberhasilan pembangunan di sektor transportasi dapat memenuhi perkembangan wilayah. Seiring dengan meningkatnya jumlah habitat, dan semakin majunya peradaban komunitas manusia, selanjutnya wilayah-wilayah pusat kegiatannya berkembang mengekspansi ke pinggiran-pinggiran wilayah, sedangkan kawasan-kawasan terisolir semakin berkurang, dan jarak antarkota semakin pendek dalam hal waktu. Lebih dari itu kuantitas dan kualitas baik perkotaan besar maupun perkotaan kecil tumbuh, dimana kota kecil ditumbuhkembangkan sementara kota besar semakin berkembang, sehingga area perkotaan semakin meluas.

2.1.2.4 Jenis Alat atau Moda Transportasi

Berdasarkan perbedaan pada sifat jasa, operasi, dan biaya pengangkutan maka jenis moda transportasi dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu sebagai berikut (nasution, 2003):

a. Angkutan Kereta Api (*Rail Road Railway*)

Angkutan kereta api adalah jenis angkutan yang bergerak diatas rel. Kereta api sendiri dapat mengangkut barang dan manusia dalam jumlah yang banyak dalam sekali jalan, baik menempuh jarak dekat maupun jarak jauh. Kereta api terdiri dari

satu unit lokomotif dan beberapa gerbong yang berguna untuk tempat menampung barang atau manusia selama perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan.

b. Angkutan Bermotor dan Jalan Raya (*Motor Road/Highway Transportation*)

Angkutan bermotor pada umumnya beroperasi di jalan raya yang sudah disediakan sebagai sarana untuk transportasi. Angkutan ini dapat berupa mobil, sepeda motor, dan sebagainya.

c. Angkutan Laut (*Water/Sea Transportation*)

Angkutan laut adalah jenis angkutan yang digunakan untuk memperlancar arus perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal. Sekarang ini di bidang pelayaran beroperasi beberapa jenis kapal, antara lain kapal penumpang, kapal barang, kapal peti kemas, kapal pengangkut kayu, dan kapal tangki minyak.

d. Angkutan Udara (*Air Transportation*)

Angkutan udara adalah jenis transportasi yang menggunakan pesawat terbang sebagai moda transportasinya dengan dilengkapi oleh teknologi di bidang navigasi, dan telekomunikasi.

e. Angkutan Pipa (*Pipelene*)

Angkutan jenis pipa digunakan untuk mengangkut air, minyak, pupuk dan barang tambang lainnya yang melalui pipa yang sudah saling terhubung baik itu berada di darat, laut, ataupun di bawah tanah.

2.1.3 Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional, seperti pembelian persenjataan dan alat-alat kantor pemerintah, pembangunan jalan dan bendungan, gaji pegawai negeri, angkatan bersenjata, dan lainnya (Samuelson, 1997). Belanja pemerintah juga merupakan instrumen pengukur dimana pemerintah menentukan seberapa besar peran sektor pemerintah dan sektor swasta. Di samping itu, belanja pemerintah dapat menjadi penentu pokok jumlah pengeluaran agregat, dan juga penentu pertumbuhan GNP riil jangka pendek.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, pemerintah membutuhkan sejumlah pembiayaan. Dalam hal ini didukung oleh penerimaan pemerintah baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun penerimaan pembangunan. Kegiatan pemerintah yang berupa belanja pemerintah dibagi dua yaitu: belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin adalah bagian yang biasanya dibelanjakan setiap tahun anggarannya secara teratur. Belanja pembangunan adalah bagian dari belanja yang khusus digunakan untuk belanja pembangunan daerah.

Dalam teori makroekonomi, belanja pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Belanja pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Belanja pemerintah untuk gaji pegawai, perubahan gaji pegawai yang mempunyai proses makroekonomi dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

- c. Belanja pemerintah untuk *transfer payment*. *Transfer payment* adalah bukan pembelian barang / jasa oleh pemerintah di pasar barang, akan tetapi pos ini mencatat pembayaran atau pemberian pemerintah langsung kepada warganya, misalnya: pembayaran subsidi atau bantuan langsung tunai kepada berbagai golongan masyarakat. Pembayaran pensiun, pembayaran pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis *transfer payment* mempunyai pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administratif keduanya berbeda (Boediono, 2001 hal: 110-117).

Belanja pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh belanja pemerintah itu, semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula belanja pemerintah yang bersangkutan.

Sifat-sifat belanja pemerintah:

- a. Belanja yang *self liquidating* sebagian atau seluruhnya yaitu belanja pemerintah yang berupa pemberian jasa kepada masyarakat yang pada akhirnya adanya pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa tersebut.
- b. Belanja pemerintah yang bersifat reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomi bagi masyarakat, dengan naiknya tingkatan penghasilan dan sasaran pajak yang lain yang akhirnya menaikkan penerimaan pemerintah.
- c. Belanja yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak reproduktif yaitu belanja yang langsung menambah kesejahteraan masyarakat.

- d. Belanja yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Misalnya: untuk pembiayaan pertahanan dan perang.
- e. Belanja yang merupakan penghematan di masa yang akan datang (Suparmoko, 1996; 48).

Ada beberapa teori mengenai perkembangan belanja pemerintah yang telah dikembangkan para ekonom. WW Rostow dan RA Musgrave berpendapat bahwa perkembangan belanja pemerintah sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Ada perbedaan fokus alokasi sumber daya antara negara pada tahap awal perkembangan, tahap menengah pembangunan, dan tahap lanjut yang kemudian tercermin dalam belanja negara. Masing-masing tentunya berbeda. Ini tentunya berkaitan dengan seberapa lama negara itu telah merdeka dan kualitas sumber daya manusianya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui negara pada awal perkembangan ekonomi sebelum menuju tingkat yang lebih tinggi. Begitu juga, ada beberapa hal yang sudah terpenuhi oleh negara pada tahap lanjut pembangunan, sehingga tidak perlu lagi terfokus pada penyediaan prasarana layaknya negara pada tahap awal perkembangan.

2.1.3.1 Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Investasi

Teori belanja negara menguraikan tiga tahapan yang pasti dilalui setiap negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, diperlukan belanja pemerintah yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, dan pendidikan. Pada tahap menengah pembangunan

ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Kemudian pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, belanja pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Gagasan lain dikemukakan oleh Adolph Wagner. Pengamatan empiris yang dilakukannya terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, belanja pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan nasional negara tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap investasi.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Perkembangan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan prestasi kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya (Sadono, 2006).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonominya atau tidak. (Suryana, 2005).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun sehingga untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan pendapatan nasional dari berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Perubahan dalam nilai pendapatan nasional hanya disebabkan oleh suatu perubahan dalam suatu tingkat kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Di sini ada dua sisi penting yaitu output total dan jumlah penduduk. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Aspek ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang. Kenaikan output per kapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian diikuti dengan penurunan output per kapita bukan pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila dalam jangka waktu 5 tahun mengalami kenaikan output per kapita.

2.1.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Investasi

Terdapat keterkaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dalam pendapatan nasional dan investasi. Hubungan keduanya menjadi suatu sorotan para ekonom, baik dari kalangan Klasik maupun Neo Klasik. Teori pendapatan nasional Keynesian yang menggunakan pendekatan pengeluaran agregatif, dimana besarnya pendapatan nasional suatu negara diukur dari komponen-komponen *expenditure* para pelaku ekonominya lewat anggaran-anggarannya yaitu; sektor rumah tangga (C), perilaku usaha dan dunia usaha tercermin lewat komponen investasi (I) yang ditanam, pemerintah melalui anggaran belanjanya (G) dan sektor perdagangan internasional

yang tercermin lewat nilai ekspor / impor netto-nya. Teori diatas selanjutnya menurunkan pertimbangan parsial pada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan investasi. Seperti halnya dalam konsumsi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga, investasi oleh para pengusaha ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satu diantara faktor-faktor penting yang dipertimbangkan adalah besarnya nilai pendapatan nasional yang dicapai (Sukirno, 2006).

Sudono (1996), dalam kebanyakan analisa mengenai penentuan pendapatan nasional pada umumnya variabel investasi yang dilakukan oleh pengusaha berbentuk investasi otonom (besaran / nilai tertentu investasi yang selalu sama pada berbagai tingkat pendapatan nasional). Tetapi adakalanya tingkat pendapatan nasional sangat besar pengaruhnya pada tingkat investasi yang dilakukan (Isa Salim, 2006). Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi itu akan memperbesar permintaan atas barang-barang dan jasa. Maka keuntungan yang dicapai oleh sektor usaha dapat mencapai targetnya, dengan demikian pada akhirnya akan mendorong dilakukan investasi-investasi baru pada sektor usaha. Dengan demikian, apabila nilai pendapatan nasional semakin bertambah tinggi, maka investasi akan bertambah tinggi pula. Dan sebaliknya semakin rendah nilai pendapatan nasional, maka nilai permintaan investasinya akan semakin rendah pula. Pengembangan yang dilakukan para ekonom Neo Klasik pada teori Keynes ini terlihat pada formulasi yang dikembangkannya pada model akselerator investasi.

Dijelaskan bahwa laju investasi adalah sebanding dengan perubahan output dalam perekonomian.

2.1.5 Inflasi

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang berkaitan dengan dampaknya yang sangat luas terhadap makro ekonomi. Inflasi sangat berperan dalam mempengaruhi mobilisasi dana lewat lembaga keuangan informal. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dan persisten dari suatu perekonomian (Susanti, 2000). Kenaikan dalam harga rata-rata seluruh barang dan jasa dalam perekonomian harus dibedakan dari kenaikan harga relatif dari barang-barang secara individual. Secara umum, kenaikan harga diikuti pula dengan perubahan dalam struktur harga relatif, tetapi hanya kenaikan secara keseluruhan yang dianggap sebagai inflasi.

Menurut Nasution (1999:20) inflasi juga dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang mengindikasikan semakin lemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai mata uang suatu negara (Isa Salim, 2006). Jadi inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga secara tajam yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Seiring dengan kenaikan harga tersebut, nilai uang turun secara tajam pula sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut. Namun tidak semua kenaikan harga menyebabkan inflasi. Harga masing-masing barang dan jasa ditentukan dengan banyak cara. Dalam pasar persaingan sempurna, interaksi banyak pembeli dan penjual, yakni bekerjanya penawaran dan permintaan menentukan harga.

Ketika harga semua barang naik, kenaikan itu bisa atau tidak menjadi bagian dari inflasi pada kelompok barang yang lebih besar. Karena inflasi adalah kenaikan tingkat harga keseluruhan, inflasi terjadi ketika harga naik secara serempak. Kita mengukur inflasi dengan melihat sejumlah barang dan jasa dan menghitung kenaikan harga rata-rata selama beberapa periode waktu.

2.1.5.1 Jenis Inflasi

Menurut Nopirin (1998), inflasi dibedakan sebagai berikut:

a. Menurut Sebabnya:

1. Inflasi Permintaan (*Demand-Full Inflation*), inflasi timbul karena bertambahnya permintaan masyarakat akan barang-barang atau adanya kenaikan permintaan modal total (*Aggregat Demand*).
2. Inflasi Ongkos (*Cost-Push Inflation*), inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi dan diikuti dengan resesi, keadaan ini dimulai dengan adanya penurunan total (*Aggregat Demand*).

b. Menurut Asalnya:

1. Inflasi dari dalam negeri (*Domestic Inflation*), timbul karena defisit anggaran belanja dengan pencetakan uang baru, panen gagal, dan sebagainya.
2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*Imported Inflation*), inflasi ini timbul karena adanya kenaikan barang dan jasa di luar negeri atau dinegara-negara langganan berdagang yang akibatnya menaikkan harga di dalam negeri.

2.1.5.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Investasi

Hubungan antara inflasi dengan investasi adalah negatif. Tingginya inflasi disuatu negara, mengakibatkan penawaran uang atau *money supply* meningkat, kemudian diikuti dengan tingginya suku bunga, dengan suku bunga yang cenderung tinggi maka investasi akan turun. Tingginya inflasi juga menyebabkan daya beli pada masyarakat menurun yang kemudian menyebabkan berkurangnya pengembalian atau keuntungan investasi, sehingga menurunkan minat investor untuk berinvestasi.

Seorang investor akan cenderung untuk melakukan investasi apabila tingkat inflasi di suatu negara adalah stabil. Hal ini dikarenakan dengan adanya kestabilan dalam tingkat inflasi, maka tingkat harga barang-barang secara umum tidak akan mengalami kenaikan dalam jumlah yang signifikan. Oleh karena itu, investor akan merasa lebih terjamin untuk berinvestasi pada saat tingkat inflasi di suatu negara cenderung stabil atau rendah. Dengan kata lain kenaikan inflasi akan menurunkan minat investor untuk melaksanakan investasi, sebaliknya jika inflasi turun maka investasi akan meningkat.

2.1.6 Tingkat Suku Bunga

Suku bunga dapat dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Suatu rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi karena lebih banyak pendapatan dari penabung akan diperoleh. Pada suku bunga rendah orang tidak begitu suka membuat tabungan karena mereka merasa lebih baik melakukan pengeluaran konsumsi atau berinvestasi daripada menabung. Dengan demikian apabila suku bunga rendah masyarakat cenderung menambah pengeluaran konsumsinya atau pengeluaran untuk berinvestasi (Sadono Sukirno, 2006).

Secara makro, tingkat suku bunga terdiri dari nominal dan riil. Tingkat suku bunga nominal adalah *rate* yang dapat diamati di pasar, yakni tingkat bunga yang dibayar oleh bank dan tidak memperhitungkan inflasi, sedangkan tingkat suku bunga riil adalah konsep yang mengukur tingkat kembalian setelah dikurangi inflasi yang menunjukkan kenaikan daya beli masyarakat yang di dalamnya sudah memperhitungkan inflasi.

Pengaruh dari suku bunga kredit terhadap investasi dijelaskan oleh pemikiran ahli-ahli ekonomi Klasik yang menyatakan bahwa investasi adalah fungsi dari tingkat bunga. Pada investasi, semakin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi juga makin kecil. Alasannya, seorang investor akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang harus dia bayarkan untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos dari penggunaan dana (*cost of capital*). Semakin rendah tingkat bunga, maka investor akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil.

2.1.5.1 Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Investasi

Suku bunga yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah suku bunga riil. Suku bunga riil adalah suku bunga setelah dikurangi dengan inflasi (atau Suku Bunga Riil = Suku Bunga Nominal - ekspektasi inflasi). Hubungan tingkat suku bunga dengan investasi adalah negatif.

Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi investasi. Fluktuasi tingkat suku bunga menjadi pertimbangan bagi investor. Apabila tingkat suku bunga lebih rendah dari yang diharapkannya, maka seseorang akan

memilih menginvestasikan uangnya daripada menyimpan uangnya di Bank ataupun meminjamkan uangnya kepada orang lain. Jika dana investasi diperoleh dari meminjam Bank atau pihak lain dengan tingkat bunga lebih rendah dari keuntungan yang akan diperoleh tersebut dapat digunakan untuk menutup tingkat bunga pinjaman.

Makin tinggi tingkat bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi semakin kecil. Alasannya seorang investor akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang harus dia bayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana atau *cost of capital*. Makin rendah tingkat bunga maka pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil.

2.2 Kajian Empiris Hasil-Hasil Penelitian Sebelumnya

Aditya Prawatyo (1996) dengan Penelitiannya “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Indonesia “ dalam penelitiannya tersebut Aditya menganalisis pengaruh variabel-variabel Produk Domestik Bruto (PDB), Impor Barang Modal dan Bahan Baku (MB, MBB), tingkat suku bunga didalam negeri (SBD), jumlah uang yang beredar (JUB), pengeluaran pemerintah (PP), serta kebijaksanaan deregulasi pemerintah (D) terhadap investasi swasta (PMDN + PMA). Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: variabel (PDB) berpengaruh secara nyata terhadap investasi swasta di Indonesia. Variabel impor barang modal dan bahan baku tidak signifikan mempengaruhi investasi swasta. Hal tersebut disebabkan karena nilai impor sesungguhnya sudah tercakup didalam Produk Domestik Bruto.

Sedangkan tingkat suku bunga dalam negeri berpengaruh secara negatif dan elastis terhadap investasi swasta tanah air. Sebaliknya kenaikan suku bunga di luar negeri akan berdampak positif bagi investasi swasta di Indonesia. Dan ternyata pemerintah masih berperan penting sebagai motor penggerak investasi di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan pengaruh pengeluaran pemerintah yang signifikan mempengaruhi investasi swasta.

Isa Salim (2006) dalam penelitiannya “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pada Sektor Pertanian Di Indonesia Periode Tahun 1984-2004” menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks harga produk-produk pertanian, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi yang kaitannya dengan penjualan produk pertanian keluar negeri, nilai tukar mata uang asing yang menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat investasi tersebut baik investasi masyarakat (PMDN) maupun investor asing (PMA). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Pertumbuhan Produksi Domestik Bruto, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Indeks Harga produk pertanian, Tingkat suku bunga dan Inflasi secara simultan mempengaruhi besarnya investasi pada sektor pertanian. Sedangkan variabel nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mempunyai kontribusi negatif dalam mempengaruhi Nilai Investasi Sektor Pertanian.

Dadang Firmansyah (2008) dalam penelitiannya “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Indonesia Periode Tahun 1985-2004” menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja, Infrastruktur (Panjang Jalan), dan krisis Ekonomi (Dm) terhadap pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia priode tahun 1985-2004. Berdasarkan

hasil estimasi tersebut Variabel Produk Domestik Bruto (PDB) tidak berpengaruh terhadap PMDN, Tenaga Kerja berpengaruh terhadap PMDN, Infrastruktur (Panjang Jalan) tidak berpengaruh terhadap PMDN, dan Krisis Ekonomi (Dm) berpengaruh terhadap PMDN. Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB), Tenaga kerja yang Bekerja, Infrastruktur (Panjang Jalan) dan Krisis Ekonomi (Dm) secara serempak mempunyai pengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri.

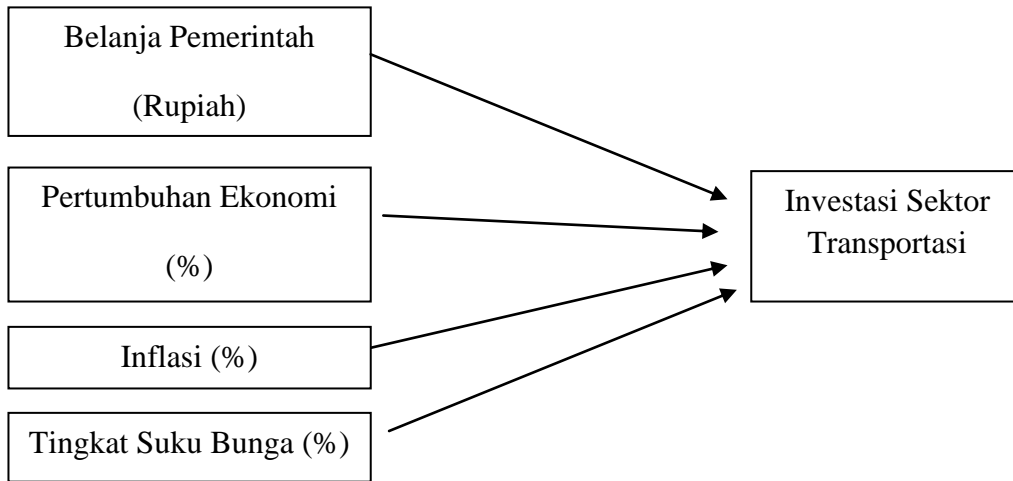
Imelda Mustika (2007) dalam analisis perbandingan PMDN dan PMA di Indonesia, menganalisis tentang pengaruh produk domestik bruto, inflasi, tingkat suku bunga kredit terhadap PMDN Indonesia tahun 1986-2005. Dimana produk domestik bruto (PDB) berpengaruh negatif terhadap PMDN Indonesia. Sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap PMDN Indonesia. Untuk tingkat suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap PMDN Indonesia.

Fajar Febriananda dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri di Indonesia Periode Tahun 1988-2009” menganalisis pengaruh Suku Bunga Kredit, Tingkat Inflasi, Tenaga Kerja, dan Nilai Tukar (kurs) terhadap Investasi dalam negeri di Indonesia. Suku Bunga Kredit dan Inflasi berpengaruh negatif terhadap Investasi dalam negeri di Indonesia, sedangkan Tenaga Kerja dan Nilai Tukar (Kurs) berpengaruh positif terhadap Investasi dalam negeri di Indonesia.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Sudono (1996), dalam kebanyakan analisa mengenai penentuan pendapatan nasional pada umumnya variabel investasi yang dilakukan oleh pengusaha berbentuk investasi otonom (besaran nilai tertentu investasi yang selalu sama pada berbagai tingkat pendapatan nasional). Tetapi adakalanya tingkat pendapatan nasional sangat besar pengaruhnya pada tingkat investasi yang dilakukan (Isa Salim, 2006). Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi itu akan memperbesar permintaan atas barang-barang dan jasa. Maka keuntungan yang dicapai oleh sektor usaha dapat mencapai targetnya, dengan demikian pada akhirnya akan mendorong dilakukan investasi-investasi baru pada sektor usaha.

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh tempo pinjaman modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Di Indonesia kenaikan tingkat inflasi yang cukup besar biasanya akan diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga perbankan. Dengan mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya diatas, penelitian ini mencoba mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Suku Bunga terhadap investasi sektor transportasi di Indonesia. Selengkapnya ditunjukkan pada kerangka pikir penelitian dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.4 Hipotesis

Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap investasi di sektor transportasi di Indonesia sedangkan Inflasi dan Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap investasi di sektor transportasi di Indonesia periode 2001-2010.